



Demonstrasi Mahasiswa PMII terkait Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Lumajang: Partisipasi Mahasiswa dalam Menyuarakan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Ahmad Zidan¹, Thifli Ahmad², Yusril Huda³

Universitas Jember

zidan.az511@gmail.com¹, ivanpahlevi323@gmail.com², yusrilhuda0@gmail.com³

Abstract. *Demo stands for demonstration which refers to the act or process of showing, demonstrating, or explaining something to others. It can be a live action or a presentation to illustrate how something works, how a product or service is used, or how a concept or idea is implemented. A demonstration is an act or attempt to show or demonstrate something, whether in the context of expressing an opinion, spraying a message, or conveying information to a public audience. Demonstrations are often conducted by groups or individuals to create awareness, influence change, or communicate a particular message. This research has several main objectives, namely to understand the initial chronology that led PMII to conduct a demonstration at the Lumajang district government office, the district government's reaction or response to the protest against the Lumajang regent and the chairman of the DPRD, the content of the messages conveyed by PMII during the demonstration, and the efforts or solutions proposed to overcome the problem. The research methods used include news analysis and field research.*

Keyword: *Demonstration, Lumajang, Students*

Abstrak. Demo adalah singkatan dari demonstrasi yang merujuk kepada tindakan atau proses untuk menunjukkan, memperlihatkan, atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Demonstrasi ini bisa berupa aksi nyata atau presentasi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja, bagaimana suatu produk atau layanan digunakan, atau bagaimana suatu konsep atau ide diimplementasikan. Demonstrasi adalah tindakan atau upaya untuk menunjukkan atau memperlihatkan sesuatu, baik dalam konteks menyatakan pendapat, menyebarkan pesan, atau menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Demonstrasi seringkali dilakukan oleh kelompok atau individu untuk menciptakan kesadaran, mempengaruhi perubahan, atau mengkomunikasikan pesan tertentu. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk mengetahui kronologi awal yang membuat PMII melakukan demonstrasi di kantor pemerintah kabupaten Lumajang, reaksi atau respon pemerintah kabupaten terhadap aksi protes terhadap bupati dan ketua DPRD Lumajang, isi pesan yang disampaikan PMII dalam aksi tersebut, dan upaya atau solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis berita dan penelitian lapangan.

Kata kunci: Demonstrasi, Lumajang, Mahasiswa

LATAR BELAKANG

Demonstrasi dan protes yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Mahasiswa sering menjadi penggerak utama aksi yang menentang kebijakan pemerintah atau tindakan yang dianggap melanggar hak-hak dan kepentingan masyarakat. Fenomena ini menggarisbawahi peran mahasiswa dalam proses demokratisasi, advokasi hak asasi manusia, dan pendorong perubahan sosial. Mahasiswa sebagai kelompok yang seringkali lebih terbuka terhadap gagasan dan nilai-nilai baru memiliki potensi untuk menjadi kekuatan positif dalam mendorong perubahan. Mahasiswa disini memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyuarakan

aspirasi masyarakat sehingga aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di satu sisi, demonstrasi mahasiswa dapat menjadi wujud dari hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara dan berkumpul. Demo merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, yang kadang kala mengharuskan mereka untuk menghadapi aksi demo tersebut dengan tindakan khusus. Fenomena demonstrasi antara pemerintah dengan mahasiswa adalah hal yang kompleks dan memiliki berbagai aspek, termasuk peran media massa dalam meliput peristiwa, dampak sosial dan ekonomi, serta respons hukum terhadap demonstran. Tetapi, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa demonstrasi seringkali berpotensi untuk menimbulkan kekerasan. Aksi unjuk rasa ini juga cenderung menciptakan suasana yang kurang kondusif. Hal ini seringkali disebabkan oleh reaksi yang kurang proaktif dan sikap apatis dari pemerintah terhadap aspirasi para demonstran. Pemerintah seringkali menunjukkan ketidakpedulian terhadap tuntutan mereka, sehingga akibatnya para demonstran mungkin merasa perlu menggunakan tindakan represif sebagai satu-satunya cara agar aspirasi mereka lebih didengar.

Fokus penelitian ini mengarah pada dinamika sosial aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa PMII. Tujuan Mahasiswa Pmii melakukan unjuk rasa yaitu mengoreksi kinerja bupati selama lima tahun terakhir yang dinilai masih banyak janji politiknya yang masih belum terlaksana. Sebelumnya para mahasiswa juga mendatangi kantor DPRD untuk memaksa masuk pada saat sidang paripurna karena tidak mengusulkan nama calon pj bupati. Permasalahan ini akan dijawab melalui beberapa pertanyaan berikut: Pertama, faktor apa saja yang menjadi pemicu aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa PMII di Lumajang. Kedua, bagaimana sikap pemerintah dalam merespon keluhan mahasiswa PMII Lumajang.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik belum tentu bersifat negatif karena sistem sosial mempunyai lebih banyak fungsi. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Selain itu, Coser percaya bahwa konflik tidak harus bersifat disfungsional, karena konflik dapat menimbulkan interaksi dan menimbulkan akibat positif dan konflik dapat memotivasi anggota kelompok yang terisolasi untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Fungsi positif konflik mungkin terlihat paling jelas dalam dinamika hubungan di

dalam dan di luar kelompok, dengan risiko terjadinya generalisasi yang berlebihan proses sosial yang ditekankan dalam model fungsional dapat diterapkan pada hubungan sosial dalam suatu kelompok. Sedangkan proses sosial yang ditekankan dalam model konflik dapat diterapkan pada hubungan sosial antar kelompok dan luar kelompok. Kedua proses ini saling berhubungan secara langsung, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok-dalam bertambah tinggi karena tingkat konflik dengan kelompok-luar bertambah besar.

Menurut Ralf Dahrendorf (1959), konflik hanya muncul dari hubungan sosial dalam suatu sistem. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya konflik akan melibatkan individu atau kelompok yang tidak memiliki hubungan dengan sistem. Hubungan ini terikat pada kekuasaan. Dengan kekuasaan ini, beberapa aktor melakukan kontrol dan hukuman yang memungkinkan mereka yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan mengambil keuntungan dari mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Dahrendorf menekankan bahwa konflik sering disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan antara pihak otoritas yang sah dan mereka yang tunduk pada mereka. Dahrendorf tidak secara sistematis membedakan antara posisi mereka yang berada di puncak, yang menjalankan wewenang atas seluruh asosiasi dan tidak bergantung pada siapapun, dan mereka yang berada di tingkat menengah, yang di satu sisi menjalankan kekuasaan atas bawahannya namun juga bergantung pada orang lain. Kepentingan kelas penguasa antara lain adalah mempertahankan legitimasi posisi dominannya, atau dengan kata lain mempertahankan status quo, setidaknya dalam kaitannya dengan struktur kekuasaan tersebut. Sedangkan untuk kepentingan kelas bawah adalah menantang legitimasi struktur otoritas kelas penguasa yang ada. Kepentingan-kepentingan yang bertentangan ini ditentukan oleh sifat struktur kekuasaan dan bukan oleh orientasi pribadi atau subjektif dari individu yang berpartisipasi di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis aksi demonstrasi mahasiswa PMII di Kota Lumajang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai konteks, motivasi, dan dampak dari aksi demo. Metodologi penelitian ini akan mencakup beberapa langkah, antara lain pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan peserta aksi, anggota PMII, dan pemangku kepentingan terkait, seperti aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga akan menganalisis dokumen terkait aksi demo tersebut, seperti pernyataan resmi, pemberitaan media, dan komunikasi online. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan

pendekatan kualitatif untuk mengetahui motivasi, tujuan, dampak, dan persepsi terkait aksi demo ini. Pendekatan ini akan memberikan wawasan mengenai aksi demo mahasiswa PMII di Kota Lumajang dan memungkinkan kami menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ketua cabang PMII Lumajang Khoirul Hasan tujuan para mahasiswa melakukan aksi demo di kantor dprd dikarenakan ingin mengetahui alasan kenapa penjabat (Pj) tidak ditandatangani oleh ketua dewan, hal inilah yang menjadi tuntutan mahasiswa PMII. Seperti yang telah diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengajukan tiga nama calon penjabat (Pj) kepala daerah untuk 13 kabupaten/kota kepada kementerian dalam negeri. Satu dari tiga calon yang diusulkan Gubernur Khofifah sebagai Pj adalah Bupati Lumajang Indah Wahyuni, yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur. Kemudian, ada Gatot Soebroto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. Terakhir, ada Budi Sarwoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Timur.

Namun, pihak DPRD Lumajang belum juga mengirimkan satupun nama calon penjabat (Pj) Bupati Lumajang yang seharusnya sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 9 september 2023. Ketidaksepakatan dalam usulan nama antara fraksi-fraksi dalam DPRD disebut sebagai penyebab utama keterlambatan pengajuan nama calon Pj Bupati Lumajang. Mahasiswa PMII juga menuntut ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk mundur dari jabatannya dikarenakan dinilai kurang efisien dalam melakukan pekerjaannya. Setelah melakukan aksi protes kepada pihak DPRD Lumajang, sekelompok mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lumajang melanjutkan unjuk rasa mereka ke kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Mereka berusaha untuk bertemu langsung dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. PMII pada awalnya memiliki niat untuk menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang selama lima tahun memimpin Kabupaten Lumajang. Namun, setelah menunggu lebih dari dua jam, Bupati Lumajang tidak dapat menerima para demonstran karena sedang terlibat dalam aktivitas di luar kantor.

Sulaiman, seorang juru bicara dalam aksi demonstrasi PMII, mengungkapkan sejumlah kritik dalam orasinya, termasuk salah satunya terkait program seribu CCTV. Program seribu CCTV adalah salah satu janji politik Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat masa kampanye

silam dengan tujuan mengurangi angka kriminalitas di daerah lumajang. Terungkap bahwa program tersebut tidak berhasil menurunkan tingkat kejahatan di Kabupaten Lumajang karena beberapa CCTV tidak berfungsi dengan baik. Sulaiman juga mencatat bahwa banyak jalan di Lumajang yang rusak parah, menjadi keluhan serius dari warga setempat. Masalah pemenuhan air bersih di beberapa kecamatan juga belum optimal, mengakibatkan krisis air bersih bagi sebagian warga Lumajang. Selain itu, penanganan tanggul yang rusak di Gambiran dianggap berjalan lambat, yang berdampak pada kekeringan lahan pertanian dan sumur warga di Desa Boreng dan sekitarnya. PMII juga mengkritik perawatan alun-alun, di mana pemerintah dinilai hanya fokus pada pembangunan tanpa mempertimbangkan perawatan yang diperlukan. Namun, sayangnya, PMII tidak dapat bertemu dengan Bupati atau Wakil Bupati Lumajang, dan hanya bisa bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang. Massa memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintah dibawah pimpinan Thoriqul Haq. Para demonstran menilai bahwa tujuh janji politik yang diberikan oleh bupati mendapat penilaian buruk. Janji-janji tersebut mencakup penyediaan 1000 beasiswa, pengadaan wifi dan CCTV, perbaikan jalan kabupaten, perawatan fasilitas umum, serta ketersediaan pupuk bersubsidi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyatakan bahwa pihaknya akan menginformasikan kritik tersebut kepada Bupati Lumajang. Namun, Triyono Sekda kota Lumajang menyayangkan aksi demo mahasiswa pmii tersebut yang terkesan ricuh dan mengabaikan kultur-kultur yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Agus Triyono juga sedikit menyindir terhadap para mahasiswa karena begitulah kualitas mahasiswa yang melakukan demo yaitu mengabaikan kultur-kultur yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa karena menurut pengamatannya sampah gelas-gelas air minum yang disediakan oleh pemkab lumajang dibuang sembarangan di area lobi dari kantor Pemkab lumajang. Terkait dari Aspirasi mahasiswa sendiri Agus triyono sekiranya nanti akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada pimpinan tertingginya yaitu Bupati lumajang Thoriqul Haq.

KESIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada dinamika sosial aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa PMII di Lumajang. Mahasiswa PMII melakukan aksi demo untuk mengoreksi kinerja bupati selama lima tahun terakhir yang dianggap masih banyak janji politik yang belum terlaksana. Selain itu, mereka juga menyoroti ketidaksetujuan terhadap penunjukan calon penjabat (Pj) bupati. Beberapa poin penting dari penelitian ini dapat yaitu Adanya Pemicu Aksi Demo Mahasiswa PMII di Lumajang, Sikap Pemerintah Terhadap Keluhan Mahasiswa PMII,

Kritik dan Tuntutan Mahasiswa PMII, Respons Sekretaris Daerah Terhadap Aksi Demo. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks, motivasi, dan dampak aksi demo mahasiswa PMII di Lumajang. Teori dan Konsep yang digunakan yaitu Konsep konflik dari Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf digunakan untuk memahami dinamika sosial dalam aksi demo mahasiswa sehingga Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang aksi demo mahasiswa PMII di Lumajang, menyoroti isu-isu penting terkait pemerintahan, kebijakan, dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dalam konteks lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Akinyetun, T., Bakare, K., & Adedini, S. (2023). *Youth and Peacebuilding: Policy Implications of Conflict Resolution in Africa*. *Journal Of Contemporary Sociological Issues*, 3(1), 68-88. <https://doi.org/10.19184/csi.v3i1.31263>
- Amanah, S., Rosa, D. V., & Prasetyo, H. (2013). *Pasca Bencana dan Ketakterhentiannya: Studi Tentang Kultur Resiko dalam Keseharian yang Traumatis*. Universitas Jember. Retrived from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85556>
- Prasetyo, H. (2014). *Amarah Sang Massa: Tentang Subalternitas, Nalar, dan Kuasa*. Universitas Jember. Retrived from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85355>
- Prasetyo, H. (2010). *Form-Actions dalam Simulakra Identitas*. Universitas Jember. Retrived from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85542>
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dahrendorf, R. (1967). *Society and Democracy in Germany*. Doubleday.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia.